

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahasa Mandarin merupakan salah satu bahasa asing yang terdapat di Indonesia. Kedudukan bahasa Mandarin sebagai bahasa asing di Indonesia telah ditetapkan dalam Seminar Politik Bahasa 1999, yang menyatakan bahwa bahasa Mandarin merupakan bahasa asing, bukan bahasa daerah (Alwi dan Sugono, 2011: xi).

Bahasa Mandarin memiliki sejarah yang cukup panjang di Indonesia. Pengajaran bahasa Mandarin di Indonesia dimulai pada permulaan abad ke-20, yaitu dengan berdirinya sekolah berbahasa Mandarin¹ yang dibentuk oleh perkumpulan Tiong Hoa Hwe Koan (THHK) Batavia pada tahun 1901 (Nio, 1940: 22). Sekolah tersebut menjadi sekolah pertama yang memberikan pelajaran bahasa Mandarin di Indonesia. Pendirian sekolah berbahasa Mandarin di Batavia kemudian mendorong pendirian lebih banyak sekolah THHK di daerah lain.

Keberadaan THHK membantu penyebaran bahasa Mandarin di antara masyarakat Tionghoa Indonesia. Pada permulaannya, pembelajaran bahasa Mandarin diperuntukkan bagi anak-anak keturunan Tionghoa (Sutami, 2012: 218). Meski pembelajaran bahasa Mandarin telah berlangsung sejak tahun 1901 hingga 1950, jumlah orang Tionghoa Indonesia yang menguasai bahasa Mandarin pada tahun 1950

¹ Yang dimaksud dengan sekolah berbahasa Mandarin adalah sekolah yang dalam pembelajarannya menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar.

masih terbatas. Ang (1950: 8), wartawan senior *Sin Po* dan salah satu pengurus THHK, mengatakan bahwa pada masa itu belum terlalu banyak orang Tionghoa yang mau memperdalam bahasa Mandarin karena posisi Tiongkok yang belum bergengsi di hubungan internasional.

Sekolah-sekolah berbahasa Mandarin bagi anak-anak Tionghoa berdiri selama kurun waktu 1950-1960-an (Xiao, 1996: 322). Pada masa itu terdapat lebih dari 1600 sekolah Tionghoa di Indonesia, dan hampir semua kota besar memiliki sekolah Tionghoa yang tidak hanya didirikan oleh THHK.

Perkembangan suasana politik internasional dan nasional turut memengaruhi pertumbuhan sekolah berbahasa Mandarin di Indonesia. Di tingkat internasional, terjadi pertentangan antara sekolah yang pro-Beijing (Republik Rakyat Tiongkok) dengan yang sekolah pro-Taipei (Taiwan) (Zhou, 2019: 170-180). Sementara itu, di tingkat nasional terjadi peristiwa politik pada tahun 1965 yang menyebabkan terjadinya pergantian pemerintahan yang berkuasa. Pergantian pemerintahan membuat pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia berada pada situasi stagnan.

Ketika pemerintahan Orde Baru berkuasa (1966-1998), diterbitkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan etnis Tionghoa seperti pembatasan pelaksanaan kegiatan terkait adat istiadat, kepercayaan, dan kebudayaan Tionghoa; pengindonesiaan nama Tionghoa untuk orang, organisasi, dan bisnis; serta pembubaran media massa, sekolah, dan organisasi Tionghoa. Pemerintah Orde Baru juga melarang

penggunaan dan penampilan aksara bahasa Mandarin di depan umum (Sai dan Hoon, 2008; Suryadinata, 1985).

Kebijakan-kebijakan tersebut pada akhirnya menghambat perkembangan pembelajaran Mandarin. Sebagai bahasa yang dibatasi, bahasa Mandarin tidak diajarkan pada pendidikan formal, hanya diajarkan pada jenjang pendidikan nonformal. Di tingkat perguruan tinggi, hanya terdapat dua universitas yang menyelenggarakan program studi yang berhubungan dengan bahasa Mandarin, yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Darma Persada (Sutami, 2007: 227). Selain universitas, pembelajaran Mandarin hanya dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi (Tsai, 2010).

Keadaan ini berubah ketika pemerintahan Orde Baru berakhir pada tahun 1998. Kebijakan yang berhubungan dengan etnis Tionghoa setahap demi setahap mulai dihapuskan. Pembelajaran bahasa Mandarin secara luas pun kembali diizinkan setelah Presiden B.J. Habibie menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999. Abdurrahman Wahid yang menjabat sebagai presiden RI selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina yang diterbitkan pada masa Orde Baru. Dengan adanya Keppres ini, etnis Tionghoa kembali dapat menjalankan segala bentuk ekspresi kebudayaan Tionghoa, termasuk di dalamnya menggunakan bahasa Mandarin beserta aksaranya. Keppres ini memungkinkan minat mempelajari bahasa Mandarin tersalurkan secara terbuka dalam bentuk formal, nonformal, dan informal (Sutami, 2012: 213).

Perkembangan pesat pembelajaran bahasa Mandarin pada masa Reformasi terjadi bersamaan dengan kemajuan Republik Rakyat Tiongkok dalam bidang ekonomi dan politik di dunia internasional (Hoon dan Kuntjara, 2019: 574). Setelah masa Reformasi berjalan lebih dari dua puluh tahun, bahasa Mandarin menjadi salah satu bahasa asing yang diminati di Indonesia. Jika sebelumnya pembelajaran Mandarin hanya ditujukan kepada masyarakat Tionghoa, kini masyarakat non-Tionghoa pun ikut mempelajari bahasa Mandarin. Pelajaran bahasa Mandarin kini justru diberikan di banyak sekolah swasta maupun negeri dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, kursus bahasa Mandarin juga berdiri di mana-mana (Hoon dan Kuntjara, 2019; Sutami, 2012).

Meskipun pembelajaran bahasa Mandarin mengalami perkembangan selama masa Reformasi, namun tidak diikuti dengan perubahan persepsi masyarakat luas terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Hal ini kemungkinan akan berdampak pada perkembangan bahasa Mandarin yang sedang berlangsung di Indonesia, terutama jika pertumbuhan pesat pembelajaran bahasa Mandarin dilihat sebagai sesuatu yang mengancam oleh kelompok yang masih berprasangka negatif terhadap kebudayaan Tionghoa (Hoon dan Kuntjara, 2019: 593).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini disusun dengan judul “120 Tahun Pembelajaran Bahasa Mandarin di Jakarta (Tahun 1901-2021)”. Pemilihan Jakarta sebagai fokus penelitian dilakukan untuk mempersempit ruang lingkup. Selain itu, Jakarta memiliki sejarah panjang berkenaan dengan pembelajaran bahasa Mandarin.

Jakarta merupakan tempat pertama diadakannya pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia ketika sekolah THHK didirikan di Batavia pada tahun 1901.

Dalam penelitian ini, peneliti membagi kondisi pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia ke dalam empat periode. Pembagian dilakukan karena keadaan dan tujuan pembelajaran bahasa Mandarin di keempat periode ini berbeda-beda.

Periode pertama berada pada rentang tahun 1901 hingga 1945. Periode ini mencakup masa pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang. Kedua masa pemerintahan tersebut digabung karena Jepang hanya memerintah selama tiga tahun di Indonesia sejak 1942-1945. Oleh karena itu, pemerintahan Jepang dapat dikatakan sebagai akhir periode pertama dan peralihan menuju periode kedua. Periode ini dimulai dengan pendirian THHK di Batavia hingga datangnya pihak Jepang. Ini merupakan periode pertama pembelajaran bahasa Mandarin dilaksanakan di Indonesia. Pada periode ini, pembelajaran bahasa Mandarin hanya diutamakan bagi masyarakat etnis Tionghoa. Pembelajaran bahasa Mandarin pada periode ini sangat berhubungan dengan gerakan nasionalisme Tiongkok yang sedang berkembang pada awal abad ke-20.

Periode kedua berada pada rentang tahun 1945 hingga 1966, yaitu ketika Indonesia merdeka hingga berkuasanya pemerintahan Orde Baru. Periode ini mencakup banyak masa kepemimpinan. Pada tahun 1945-1949, wilayah Indonesia terbagi menjadi daerah Federal (yang dikuasai Belanda) dan daerah Republik; pada tahun 1950-1959 Indonesia berada dalam masa demokrasi parlementer; dan pada tahun 1959-1966 Indonesia memasuki masa Demokrasi Terpimpin. Meskipun periode ini

terdiri atas banyak masa kepemimpinan, periode ini ditandai oleh ciri khas pembelajaran bahasa Mandarin yang sama, yaitu masa berkembangnya sekolah berbahasa Mandarin dan persaingan politik di antara sekolah-sekolah tersebut. Bahasa Mandarin masih diajarkan sebagaimana pada periode pertama, yaitu diperuntukkan bagi masyarakat Tionghoa saja.

Periode ketiga berada pada rentang tahun 1966 hingga 1999, yaitu pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada periode ini, pembelajaran bahasa Mandarin berada pada kondisi stagnan dengan adanya pembatasan oleh pemerintah. Sekolah-sekolah berbahasa Mandarin yang sebelumnya banyak berdiri, pada periode ini ditutup seluruhnya. Pada periode ini pembelajaran bahasa Mandarin tidak berkembang.

Periode keempat berada pada rentang tahun 1998 hingga 2021 yaitu ketika Indonesia memasuki masa Reformasi pada tahun 1998 hingga tahun 2021 ketika penelitian ini dilaksanakan. Periode ini merupakan masa ketika pembelajaran bahasa Mandarin dapat kembali dilaksanakan secara luas dan terbuka. Berbeda dengan periode sebelumnya, pembelajaran bahasa Mandarin pada periode ini dilakukan bukan hanya bagi masyarakat etnis Tionghoa, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Bahasa Mandarin dipelajari bukan lagi sebagai bahasa ibu, tetapi sebagai bahasa asing.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah atau *historical research*. Untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan skripsi ini peneliti menggunakan metode dokumentasi melalui

pembacaan artikel, jurnal, dan buku. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia, khususnya setelah memasuki masa Reformasi. Selain itu, melalui penelitian ini dapat pula diperkirakan perkembangan bahasa Mandarin pada masa yang akan datang di Indonesia.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, penelitian ini berfokus pada sejarah perkembangan pembelajaran bahasa Mandarin di Jakarta pada periode 1901-2021. Sedangkan subfokus penelitian ini adalah:

1. Kondisi pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia pada periode 1901-2021.
2. Perbedaan pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia pada periode 1901-2021.
3. Peristiwa yang memengaruhi pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia pada periode 1901-2021.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia pada periode 1901-2021?
2. Apa perbedaan pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia pada periode 1901-2021?

3. Apa saja peristiwa yang memengaruhi pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia pada periode 1901-2021?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kondisi pembelajaran bahasa Mandarin di Jakarta sejak tahun 1901 hingga 2021.
2. Menggambarkan perbedaan keadaan atau kondisi pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia pada periode 1901-2021.
3. Mengetahui peristiwa apa saja yang memengaruhi pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Mengingat keterbatasan sumber, penelitian ini pastilah tidak sempurna. Namun diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, secara teoritis maupun praktis.

1). Manfaat teoretis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dalam bidang sejarah mengenai keadaan/kondisi pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia sejak tahun 1901 hingga 2021, terutama perkembangannya di Kota Jakarta.

2). Manfaat praktis

a. Bagi pembaca

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca umum berkenaan dengan perkembangan pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia – terutama di Jakarta – yang sangat terkait dengan keadaan politik di Indonesia. Pembaca juga dapat mengetahui perbedaan keadaan/kondisi pembelajaran bahasa Mandarin di Indonesia pada masa yang telah lewat dengan masa kini. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan saling pengertian budaya, mengurangi prasangka rasial, dan menyanggah stereotip yang berhubungan dengan etnis Tionghoa di Indonesia.

b. Bagi peneliti lain

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan rujukan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian dalam bidang terkait.